11/22/23, 9:24 AM **Untitled Document**

DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: CEMPAKA Kecamatan: Cempaka Kota: KOTA BANJARBARU Provinsi: KALIMANTAN SELATAN Bulan: 2 Tahun: 2023

Nama Pengisi: Maya Yunita, A.Md
Pekerjaan: Karyawan Honorer
Jabatan: Staff Sekretariat
Kepala Desa / Lurah: Suprianto, S.Pt., MM
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN
Referensi 1 : BPS Kota Banjarbaru
Referensi 2: Dukcapil Kota Banjarbaru
Referensi 3: Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
Referensi 4:

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk				
Jumlah	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	Perempuan		
Jumlah penduduk tahun ini	8526 orang	8519 orang		
Jumlah penduduk tahun lalu	8193 orang	8150 orang		
Persentase perkembangan	4.06 %	4.53 %		

B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	4494 KK	1128 KK	5622 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	4310 KK	1069 KK	5379 KK
Prosentase Perkembangan	4.27 %	5.52 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	orang

B. Kesejahteraan Keluarga	
Jumlah keluarga prasejahtera	163 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	739 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 2	572 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	2234 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	541 keluarga
Total jumlah kepala keluarga	4249 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

Total nilai bahan penolong yang digunakan

Total biaya antara yang dihabiskan

A. SUBSEKTOR PERTA	ANIAN						
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Bawang Merah	0	0	0	0	0	0	0

B. SUBSEKTOR PERK	EBUNAN						
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN Nilai Bahan Penolong yg Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) digunakan (Rp) Hasil Produksi

D. SUBSEKTOR PERIKANAI	N					
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
E. SEKTOR PERTAMBANGA	AN DAN GALIAN					
Total nilai produksi tahun ini						
Total nilai bahan baku yang di	igunakan				Rp. 0,00	

Total filal baran baku yang digunakan	RP. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Total jenis kerajinan rumah tangga	jenis
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	
I.1. Subsektor Perdagangan Besar	
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 0,00
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran	
Jumlah total jenis perdagangan eceran	jenis
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 0,00
I.3. Subsektor Hotel	
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
I.4. Subsektor Restoran	
	11-34
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00 Rp. 0,00
ounnum total polluapatan yang ulperolen	ητη. 0,00
I. Calday Pangunan/Kanatyukai	+
J. Sektor Bangunan/Konstruksi	unit
Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	unit
Biaya pemelinaraan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Total nilal bangunan yang ada Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
enera amana militya	/rp. 0,00
K. Saktor Kauangan Parsawaan dan jasa Parusahaan	
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	D: 0.00
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Jenis Dr. 0.00
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
	1, .
Jumlah perusahaan jasa	Jenis Dr. 0.00
Nilai transaksi perusahaan jasa Biava yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
Diaya talifiya	Ιτφ. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
1. O Outrolleton to a consistent	
L.2. Subsektor jasa swasta	jenis
L.2. Subsektor jasa swasta Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	Jenis
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ijenis Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai ransaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai ransaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai ransaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 lenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ijenis Rp. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungal/danau/penyeberangan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ijenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Ap 0,00 Ap 0,00 Jenis
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungal/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 ipnis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Ap. 0,00 Jenis Jenis Jenis
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungal/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 ienis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 ipnis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Ap. 0,00 Jenis Jenis Jenis
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai sest jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Unit Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai set jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah tolal kendaraan angkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah tolal kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jenis Unit Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Ap. 0,00
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Biaya yang dikeluarkan L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Biaya antara yang dikeluarkan L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai set jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Biaya antara yang dikeluarkan M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total transaksi pengangkutan Nilai total biaya yang dikeluarkan N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah itotal nilai transaksi	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jenis Unit Rp 0,00

Untitled Docum	ent				
Jumlah kegiatan penyediaan gas			jenis		
Nilai aset produksi gas			Rp 0,00		
Nilai transaksi Biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00 Rp 0,00		
Diaya amara yang unoluarkan			тр 0,00		
N.3. Subsektor Air Minum					
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum			jenis		
Nilai aset penyediaan air minum			Rp 0,00		
Nilai produksi air minum Nilai transaksi air minum			Rp 0,00 Rp 0,00		
Biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00		
N/ DENDADATAN DEDIZABITA					
IV. PENDAPATAN PERKAPITA					
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha					
A.1. Pertanian					
1. Jumlah rumah tangga		880 Keluai	ga		
2. Jumlah total anggota rumah tangga		0 orang			
Jumlah rumah tangga buruh tani Jumlah anggota rumah tangga buruh		148 Keluar 0 orang	ga		
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 0,00			
A.2. Perkebunan					
1. Jumlah rumah tangga	_	634 Keluai 0 orang	ga		
Jumlah total anggota rumah tangga Jumlah rumah tangga buruh tani		0 Keluarga	ı		
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		0 orang			
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	\Box	Rp 0,00			
A.3. Peternakan					
A.S. Peternakan 1. Jumlah rumah tangga	-	247 Keluai	rga		
2. Jumlah total anggota rumah tangga		0 orang			
3. Jumlah rumah tangga buruh tani		0 Keluarga			
Jumlah anggota rumah tangga buruh Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		0 orang Rp 0,00			
о. основня ротокрами ротокрам чан эских котоком иншк settap ruman tahiyya		. vp U,UU			
A.4. Perikanan					
1. Jumlah rumah tangga		30 Keluarg	a		
2. Jumlah total anggota rumah tangga 3. Jumlah rumah tangga buruh tani		0 orang 0 Keluarga			
3. Jumlah rumah tangga buruh tani 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		Keluarga orang			
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 0,00			
A.5. Kerajinan					
Jumlah rumah tangga Jumlah total anggota rumah tangga	_	5 Keluarga			
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	_	0 orang 0 Keluarga			
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		0 orang			
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 0,00			
A.6. Pertambangan					
1. Jumlah rumah tangga		40 Keluarg	ıa		
2. Jumlah total anggota rumah tangga		0 orang			
3. Jumlah rumah tangga buruh tani		0 Keluarga			
Jumlah anggota rumah tangga buruh Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	0 orang Rp 0.00				
A.7. Jasa dan perdagangan					
1. Jumlah rumah tangga		229 Keluarga 0 orang			
Jumlah total anggota rumah tangga Jumlah rumah tangga buruh tani		0 orang 0 Keluarga	1		
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		0 orang			
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 0,00			
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA					
Jumlah Kepala Keluarga	\rightarrow	1249 KK			
Jumlah Anggota Keluarga		0 orang			
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja		Rp 0,00 Rp 0,00			
		, , ,			
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR					
1. Sektor Pertanian					
Petani Petani	761 or				
Buruh Tani Pemilik Usaha Tani	634 or 780 or				
	. 55 01	8			
2. Sektor Perkebunan					
Karyawan Perusahaan Perkebunan	6 oran				
Buruh perkebunan Pemilik usaha Perkebunan	250 or 2 oran				
i Girinik adaria i Girebulian	∠ oran	9			
3. Sektor Peternakan					
Peternakan Perorangan	0 oran				
Buruh Usaha Peternakan Pemilik Usaha Peternakan	70 ora 0 oran				
i Gilinik Godila i Gigitiakan	o oran	9			
4. Sektor Perikanan					
Nelayan					
Buruh Usaha Perikanan	0 oran				
Buruh Usaha Perikanan Pemilik Usaha Perikanan	_				
	0 oran				
Pemilik Usaha Perikanan	0 oran	ing			
Pemilik Usaha Perikanan 5. Sektor Kehutanan Pengumpul Hasii Hutan Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 oran 30 oran 0 oran 0 oran	ing ig			
Pemilik Usaha Perikanan 5. Sektor Kehutanan Pengumpul Hasil Hutan	0 oran 30 ora 0 oran	ing ig			
Pemilik Usaha Perikanan 5. Sektor Kehutanan Pengumpul Hasil Hutan Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 oran 30 oran 0 oran 0 oran	ing ig			
Pemilik Usaha Perikanan 5. Sektor Kehutanan Pengumpul Hasil Hutan Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan 6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	0 oran 30 oran 0 oran 0 oran	ing ig ig			
Pemilik Usaha Perikanan 5. Sektor Kehutanan Pengumpul Hasil Hutan Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 oran 30 oran 0 oran 0 oran	ing ig ig ig			

Pemilik Usaha Pertambangan			
	C	orang	
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga		0	
ang kayu 10 ora rang jahit 10 ora			
Tukang jahit	ang janit 10 G		
8. Sektor Industri Menengah dan Besar			
o. Sentor maastri merengan aan besar			
9. Sektor Perdagangan			
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi		rang	
Buruh Perdagangan Hasil Bumi		rang	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	rang		
10. Sektor Jasa			
Pegawai Negeri Sipil	3	00 orang	
TNI	1	27 orang	
POLRI		5 orang	
Dokter swasta		orang	
Bidan swasta Pembantu rumah tangga		0 orang	
rembantu tuman tangga		0 Orang	
/I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT			
A. ASET TANAH			
Fidak memiliki tanah		ors	ang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha			ang
Wemiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		ora	
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		ora	
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		ora	
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		ora	ang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		ora	
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		ora	-
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha		ora	•
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha			ang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5.0 – 10 ha		ora	ang ang
Memiliki tanan antara 5,0 – 10 na Memiliki tanah lebih dari 10 ha			ang ang
Jumlah total penduduk			ang
•		510	
3. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM			
C. ASET SARANA PRODUKSI			
Memiliki penggilingan padi		2 0	orang
Memiliki traktor			orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian			orang
Memiliki kapal penangkap ikan			prang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan		0 0	orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan		0 0	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan			orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan			orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan			orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan			orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan me	nengah		orang orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas			orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING			
RUMAH MENURUT LANTAI			
RUMAH MENURUT ATAP			
RUMAH MENURUT ATAP /II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA			
'II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA			
'II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA			
'II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA 'III. PENDIDIKAN MASYARAKAT			
'II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA 'III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk	0 orang		
/II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	0 orang		
/II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	0 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA IIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin tumlah penduduk buta aseara dan huruf latin umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental umlah penduduk sedang SD/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang		
/II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tamat SD/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tadak tamat SD/sederajat lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang		
/III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah nenduduk sedang 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tamat SD/sederajat lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang		
/II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tamat SD/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang		
'III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Jumlah penduduk seda 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental Jumlah penduduk sedang SD/sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Jumlah penduduk tamat SUTP/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tamat SD/sederajat lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat lumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat lumlah penduduk tamat D-1	0 orang 0 orang 1 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang 1 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk sedang D-2	0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 10 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 170 orang 0 orang		
'III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Jumlah penduduk sedang 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Jumlah penduduk sedang SD/sederajat Jumlah penduduk tamat SD/sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Jumlah penduduk sedang D-1 Jumlah penduduk sedang D-1 Jumlah penduduk sedang D-2 Jumlah penduduk sedang D-2 Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 10 orang 0 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 7 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk seia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah nak dan penduduk cacat fisik dan mental umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk tamat SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk tamat DLT umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk tamat D-2 umlah penduduk sedang D-3	0 orang 0 orang 1 orang 1542 orang 0 orang 15542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 1 orang 0 orang 71 orang 0 orang 0 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk usia aksara dan huruf latin umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tamat SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk tamat D-1 umlah penduduk tamat D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk tamat D-3	0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 563 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 205 orang 7 orang 0 orang 0 orang 2 orang 0 orang 2 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk seda 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk tedak tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk tamat D-2 umlah penduduk tamat D-3 umlah penduduk sedang S-1	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 225 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk tamat D-2 umlah penduduk tamat D-2 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang S-1	0 orang 0 orang 1 orang 1542 orang 0 orang 1543 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 71 orang 0 orang 0 orang 0 orang 225 orang 225 orang 260 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tamat SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-3 Lumlah penduduk sedang D-3 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-2	0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 225 orang 0 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tamat SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat Lumlah penduduk tamat SLTP/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk tamat D-2 Lumlah penduduk tamat D-2 Lumlah penduduk tamat D-3 Lumlah penduduk tamat S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-2 Lumlah penduduk sedang S-2 Lumlah penduduk tamat S-2	0 orang 0 orang 1 orang 1542 orang 0 orang 1543 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 71 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 256 orang 0 orang		
/II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA /III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 48 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Iumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Iumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Iumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Iumlah penduduk sedang SD/sederajat Iumlah penduduk sedang SD/sederajat Iumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Iumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Iumlah penduduk sedang D-1 Iumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Iumlah penduduk sedang D-2 Iumlah penduduk sedang D-2 Iumlah penduduk tamat D-2 Iumlah penduduk tamat D-2 Iumlah penduduk tamat D-2 Iumlah penduduk tamat D-3 Iumlah penduduk tamat D-3 Iumlah penduduk sedang S-1 Iumlah penduduk tamat S-1 Iumlah penduduk sedang S-1 Iumlah penduduk sedang S-1 Iumlah penduduk sedang S-2 Iumlah penduduk tamat S-3	0 orang 0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 48 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/sederajat Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-3 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-2	0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang 1 205 orang 0 orang 7 1 orang 0 orang 0 orang 2 orang 0 orang		
'III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin lumlah penduduk sedang S-1 sederajat lumlah penduduk sedang SD/sederajat lumlah penduduk tamat SD/sederajat lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat lumlah penduduk sedang D-1 lumlah penduduk sedang D-2 lumlah penduduk sedang D-2 lumlah penduduk sedang D-3 lumlah penduduk sedang D-3 lumlah penduduk sedang D-3 lumlah penduduk sedang S-3 lumlah penduduk sedang S-1 lumlah penduduk sedang S-1 lumlah penduduk sedang S-2 lumlah penduduk sedang S-3 lumlah s	0 orang 0 orang 1542 orang 1542 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 25 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk buta aksara dan huruf latin Lumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tamat SD/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTA/sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat Lumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-2 Lumlah penduduk sedang D-3 Lumlah penduduk sedang D-3 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-1 Lumlah penduduk sedang S-2 Lumlah penduduk tamat S-3 Lumlah penduduk sedang S-B A Lumlah penduduk sedang SLB A Lumlah penduduk sedang SLB A Lumlah penduduk sedang SLB B	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 205 orang 0 orang		
VIII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA A. Tingkat Pendidikan Penduduk Lumlah penduduk usia aksara dan huruf latin Lumlah penduduk usia aksara dan huruf latin Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SD/sederajat Lumlah penduduk tamat SD/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat Lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat Lumlah penduduk sedang D-1 Lumlah penduduk tamat D-1 Lumlah penduduk tamat D-2 Lumlah penduduk tamat D-2 Lumlah penduduk tamat D-3 Lumlah penduduk tamat D-3 Lumlah penduduk tamat D-3 Lumlah penduduk tamat S-1 Lumlah penduduk tamat S-2 Lumlah penduduk tamat S-3 Lumlah penduduk tamat S-B Lumlah penduduk tamat SLB B Lumlah penduduk tamat SLB B Lumlah penduduk tamat SLB B Lumlah penduduk tamat SLB C Lumlah penduduk tamat SLB C	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT III. III. III. III. III. III. III. II	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 0 orang 205 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-B umlah penduduk sedang SLB A umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB C	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT III. PENDIDIKAN MASYARAKAT III. Tenduduk Masyara dan huruf latin umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk tamat D-1 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk tamat S-2 umlah penduduk tamat S-3 umlah penduduk tamat S-B umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB C	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 1205 orang 0 orang 25 orang 0 orang 260 orang 260 orang 0 orang		
III. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA III. PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Tingkat Pendidikan Penduduk umlah penduduk buta aksara dan huruf latin umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak umlah penduduk sedang SD/sederajat umlah penduduk tamat SD/sederajat umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-1 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-2 umlah penduduk sedang D-3 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-1 umlah penduduk sedang S-2 umlah penduduk sedang S-B umlah penduduk sedang SLB A umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk sedang SLB C	0 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 1542 orang 0 orang 0 orang 1563 orang 0 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 0 orang		

	Online	Document	
C. Rasio Guru dan Murid		0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak		0 orang	
Jumlah guru SD dan sederajat		97 orang	
4. Jumlah siswa SD dan sederajat		1945 orang	
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat		41 orang	
Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat		596 orang 71 orang	
Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat		544 orang	
9. Jumlah siswa SLB		0 orang	
10. Jumlah guru SLB		0 orang	
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat			
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah taman bacaan desa/kelurahan		unit unit	
Jumlah perpustakaan keliling		unit	
Jumlah sanggar belajar		unit	
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah		kegiatan	
Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A		kelompok	
Jumlah kelompok belajar Paket B		orang kelompok	
Jumlah Peserta ujian Paket B		orang	
Jumlah kelompok belajar Paket C		kelompok	
Jumlah peserta ujian Paket C		orang	
Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan		unit orang	
Junian peserta kursus keterampilan		orang	
IX. KESEHATAN MASYARAKAT			
A. Kualitas Ibu Hamil			
Jumlah ibu hamil	306 orang		
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	29 orang		
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	200 orang		
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang 10 orang		
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	100 orang		
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang		
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang		
Jumlah ibu hamil melahirkan Jumlah ibu nifas	314 orang 225 orang		
Jumlah kematian ibu nifas	1 orang		
Jumlah ibu nifas hidup	225 orang		
B. Kualitas Bayi			
Jumlah keguguran kandungan	0 orang		
Jumlah bayi lahir Jumlah bayi lahir mati	314 orang 2 orang		
Jumlah bayi lahir hidup	298 orang		
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang		
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang		
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan	10 orang		
mental	0 orang		
C. Kualitas Persalinan			
Tempat Persalinan Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit		
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit		
Tempat persalinan Puskesmas	1 unit		
Tempat persalinan Polindes Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	1 unit		
Tempat persalinan Balai Kesenatan Ibu Anak Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit 5 unit		
Tempat praktek dokter	0 unit		
Rumah dukun	0 unit		
Rumah sendiri	0 unit		
Pertolongan Persalinan			
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	31 tindakan		
Jumlah persalinan ditolong bidan	283 tindakan		
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan		
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan 0 tindakan		
ournan persamian unwong keluarya	o unuakali		
D. Cakupan Imunisasi			
Jumlah Bayi usia 2 bulan	359 orang		
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	311 orang		
Jumlah bayi usia 3 bulan Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	359 orang 311 orang		
Jumlah bayi usia 4 bulan	359 orang		
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	302 orang		
Jumlah bayi 9 bulan	212 orang		
umlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak 300 orang umlah bayi yang sudah imunisasi cacar 0 orang			
Say, yang sadan malipubi vubui	- orang		
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB			
Pasangan Usia Subur	T		
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	603 orang		
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun 2.083 orang Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun 91 orang			
Jumlah pasangan usia subur	2.083 pasangar	1	
Keluarga Berencana			
Jumlah akseptor KB	0 orang		
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	1.254 orang 121 orang		
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spirai Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	142 orang		
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	1.211 orang		
Jumlah pengguna metode vasektomi	2 orang		
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	19 orang		
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang 0 orang		
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	451 orang		
burnian penggana diai kontrasepsi metode xxx			

	1		
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	553 orang		
F. Wabah Penyakit			
Demam berdarah			
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	21 kejadian		
Jumlah yang meninggal	0 kejadian		
	-		
G. Angka Harapan Hidup			
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	65,00 Tahun		
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	6.872,00 Tahun		
Angka Harapan Hidup Provinsi	7.005,00 Tahun		
Angka harapan Hidup Nasional	70,00 Tahun		
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih			
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	797 Keluarga		
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	125 Keluarga		
Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga		
Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga 107 Keluarga		
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	8 Keluarga		
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	60 Keluarga		
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga		
Jumlah keluarga yang menggunakan mata air Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga 0 Keluarga		
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di	1		
atas	0 Keluarga		
Total jumlah keluarga	0 Keluarga		
I Positolo bidos bassib day14	1		
I. Perilaku hidup bersih dan sehat Kebiasaan buang air besar	T		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	2.091 Keluarga		
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	0 Keluarga		
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga		
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	40 Keluarga		
Pola makan	1		
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali			
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali		_	_
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	-		
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali			
r chadair yang bolam tema senam makan i kali			
Kebiasaan berobat bila sakit			
Dukun Terlatih	Sedikit		
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Banyak Sedikit		
Paranormal	Tidak ada		
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit		
Tidak diobati	Tidak ada		
J. Status Gizi Balita Jumlah Balita	00 orang		
Jumlah Balita bergizi buruk	99 orang 2 orang		
Jumlah Balita bergizi baik	86 orang		
Jumlah Balita bergizi kurang	11 orang		
Jumlah Balita bergizi lebih	1 orang		
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini			
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit	Jumlah pend	erita	Di rawat di
Jenis penyakit	Jumlah pend	erita	Di rawat di
	Jumlah pend	erita	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu	Jumlah pend	3 unit 15 unit	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pender bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah kader bina keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Unisi Diisi Diisi Diisi Diesi	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Disi Disi Disi Disi 0 jenis 0 jenis	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapanga heluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku daministrasi Posyandu Buku daministrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah keder kesehatan lainnya	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi 0 jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu aktif Jumlah pesawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku daministrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu	Jumlah pend	3 unit 15 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi 0 jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah pengunjung Posyandu Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kadiatan pelayanan Posyandu Buku kadiatan Posyandu Buku kadiatan kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kader kesehatan lainnya Jumlah kader kesehatan lainnya	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi 0 jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku daministrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengbatan gratis Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pengobatan gratis	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi 0 jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pempobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengunus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kader kesehatan lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kader kesehatan lainnya Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	Di rawat di
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku sencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengbatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan pengberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah penbina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku sencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengbatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pelugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku sencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan pengbentan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Jumlah kasu pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	Jumlah pend	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang 2 orang Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang	kasus kasus kasus kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah peter bina keluarga balita aktif Jumlah peter bina keluarga balita aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Pensyandu Jumlah kegiatan penberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar PT/RW		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kagiatan pelayanan Posyandu Buku kagiatan pelayanan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus antar kelompok masyarakat pendatang dengan penduduk asli		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah peter bina keluarga balita aktif Jumlah peter bina keluarga balita aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Pensyandu Jumlah kegiatan penberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar PT/RW		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kadara pelayanan Posyandu Buku kadara pelayanan Posyandu Buku kadara pelayanan Posyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah kasus santar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kadara pelayanan Posyandu Buku kagiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengunjung Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengunjung Posyandu Jumlah kegiatan pengunjung Posyandu Jumlah kegiatan pengunjung Posyandu Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asii Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah koran jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus casus kasus casus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku tencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kadaristrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus hoflik antara masyarakat dengan penduduk asii Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korfilik antara masyarakat dengan perusahaan		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus Rasus
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku dadministrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik natara masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan		3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus control kasus kasus control co
Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku betugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku dada pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kadinistrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan penberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pengbatan gratis Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah kasus hara kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	mpok masyarakat dari d	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus Rasus
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan Posyandu Isinnya Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan iningkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik SARA pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah konflik antar masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korflih politik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korflik politik kantara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korflia piwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korflia piwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korflian jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	mpok masyarakat dari d	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus orang
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kadia pengunjung Posyandu Buku dadian pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu lainnya Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus santar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelo Jumlah konflik antar masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antar masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik natara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik natara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik natara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik natara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	mpok masyarakat dari d	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus orang orang orang orang orang orang Rp 0,000 buah
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pengunus Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Pesyandu lainnya Jumlah kegiatan Pesyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan Lainnya X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik pada tahun ini Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli Jumlah konflik antar masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan lembaga politik Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan lembaga politik	mpok masyarakat dari d	3 unit 15 unit 75 orang 2 orang 5 Dasawisma 0 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi Diisi O jenis 0 orang 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus orang

Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara Jumlah janda akibat konflik Sara Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	orang
punian anak yalin akibal kuniik sala	orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang orang
Juliilan pelaku koniik yang diadii atau diproses secara nukum	orang
B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang
C. Pencurian	
C. Pencurian Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	10 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	- In
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	kasus
penduduk setempat	
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang
F. Deskullen, Deskusse des Desausslanen	
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	orong
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	orang orang
Jumlah kasus penjuan dan atau penggelapan	orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	orang
<u> </u>	
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	1 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	1 orang 0 kasus
Jumlah kasus maduk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
G. Prostitusi	·
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	orang
Lokalisasi prostitusi	
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	kali kali
outman penetuban penyediaan tempat prositiusi	Indii
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus kasus
	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan	kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan	kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kasus penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan nak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilian di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesejahteraan Sosial	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan apada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan nak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilian di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah kesejahteraan Sosial	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk Setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang cacat fisik	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilian di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah norang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gacat fisik Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	kasus orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gacat fisik Jumlah orang vang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh	kasus casus kasus casus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gia/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kayang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah nanah dan kawasan kumuh Jumlah panti asuhan anak	kasus casus kasus casus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kalianan kulit Jumlah panti jompo	kasus casus kasus casus
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang ga cacat fisik Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah punda usuhan anak Jumlah panti jompo Jumlah punda unak jalanan han kawasan kumuh Jumlah punda rumah singgah anak jalanan	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	kasus casus kasus casus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang gela/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jiaur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jiagrian rel kereta api Jumlah penghuni jiar hijau dan taman kota Jumlah penghuni jiar hijangiran rel kereta api Jumlah penghuni jiar hijan dan taman kota	kasus casus kasus casus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah lempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteran Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni jar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni jari di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	kasus casus kasus casus casus casus casus casus casus casus casus unit corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang syang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panta sunya yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah angota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yaitu o 18 tahun Jumlah anak yaitu o 18 tahun	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah bempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah gelandangan Jumlah gelandangan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah panti jornpo Jumlah penghuni jalur di kolong jembatan/emperan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pingiran rel kereta api Jumlah anak yalim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	kasus rorang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar rikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar rikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah narak jalanan dan terlantar Jumlah norang gila/stress/cacat mental Jumlah orang selafisik Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti sauhan anak Jumlah panti sauhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur nel kereta api Jumlah anak yaitm usia 0–18 tahun Jumlah anak yaitm usia 0–18 tahun Jumlah anak yaitm piatu 0–18 tahun	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah tapasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteran Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah nang jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah nang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gacat fisik Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hjiau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hjiau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hjiau dan taman kota Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah nanak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah landa	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah naray gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti sushan anak Jumlah panti sushan anak Jumlah panti sushan anak Jumlah penghuni jadur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jadur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jadur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jadur nie kereta api Jumlah anak yaitun usia 0–18 tahun Jumlah anak yaitun usia 0–18 tahun Jumlah anak yaitun usia 0–18 tahun Jumlah anak yaitun pida 0–18 tahun	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah Kasus yenculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah mpat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah pandi han kawasan kumuh Jumlah pandi han kawasan kumuh Jumlah pandi han kayatim usia den kereta api Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jangran rel kereta api Jumlah penghuni jangran rel kereta api Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda	kasus orang
Jumiah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumiah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumiah kasus bunuh dir Jumiah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumiah kasus penculikan Jumiah kasus penculikan Jumiah kasus penculikan dengan pelaku penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumiah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumiah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumiah kasus perkosaan pada tahun ini Jumiah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumiah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumiah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumiah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumiah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumiah haga kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumiah pengenis jalanan Jumiah pengenis jalanan Jumiah manusia lanjut usia terlantar Jumiah manusia lanjut usia terlantar Jumiah manusia lanjut usia terlantar Jumiah orang kelainan kulit Jumiah orang kelainan kulit Jumiah orang kelainan kulit Jumiah pengenis jalanan Jumiah pri jompo Jumiah panti jompo Jumiah penghuni bantaran sungai Jumiah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumiah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumiah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumiah penghuni lari di laha dan taman kota Jumiah penghuni lari di laha dan fasilitas umum lainnya Jumiah anak yatim piatu O-18 tahun Jumiah anak yatim piatu para dida sekolah di SD/sederajat	kasus mit orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesalkan secara hukum Jumlah kasus penculikan yang diselesalkan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah hasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesajahteraan Sosial Jumlah pelandangan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah norang selasitar sekainan kulit Jumlah norang sedat fisik Jumlah panda kelainan kulit Jumlah panda kelainan kulit Jumlah panda han kawasan kumuh Jumlah panda han kawasan kumuh Jumlah panda hangan kijalanan Jumlah penghuni jalur di kolong jembatan/emperan Jumlah penghuni jalur di alahan dan falalitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri di alahan dan falalitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri di alahan dan falalitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri di alahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri da lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri da lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni jaluri baturan sungai Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim yain o–18 tahun Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, yatim yain dak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluzarga menghasilikan unag	kasus crang orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desal/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desal/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di huar nikah menurut hukum adat Jumlah hempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pelandangan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah norang cacat fisik Jumlah orang cacat fisik Jumlah pandi selahan dan kawasan kumuh Jumlah penghun ibantaran sungai Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni ibart inigada nank jalanan Jumlah penghuni ilari di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni ilari di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim jatu G-18 tah	kasus mit
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah lempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahtaran Sosial Jumlah pengam jalanan dan terlantar Jumlah norang gila/stress/cacat mental Jumlah norang gila/stress/cacat mental Jumlah norang gila/stress/cacat mental Jumlah norang kelainan kulit J	kasus corang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desal/Kelurahan setempat Jumlah kasus bembunuhan dengan pelaku penduduk setempat Jumlah kasus bunuh diri Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum I. Penculikan Jumlah kasus penculikan Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desal/Kelurahan setempat Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk setempat Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum J. Kejahatan seksual Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di huar nikah menurut hukum adat Jumlah hempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks K. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah pelandangan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah nanusia lanjut usia terlantar Jumlah norang cacat fisik Jumlah orang cacat fisik Jumlah pandi selahan dan kawasan kumuh Jumlah penghun ibantaran sungai Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni ibart inigada nank jalanan Jumlah penghuni ilari di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni ilari di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim usia C-18 tahun Jumlah anak yatim jatu G-18 tah	kasus mit

Untitled Documen	τ	
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tahan longsor Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan		orang orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih		orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus		orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh		orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk		orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman		orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga		
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri		kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami		kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak		kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua		kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya		kasus
M. Teror dan Intimidasi		
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan		kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan		kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan per	nduduk	kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini		kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum f	ormal	kasus kasus
Junian penyelesalah kasus teror dan mumuasi serta hasulah di masyarakat baik secara adat maupun hukum i	Official	kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta		I .
Organisasi Siskamling		Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat		Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda		44 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas		0 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda Buku anggota Hansip dan Linmas		Tidak 0 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta		0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah		0 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan		37 Pos
VI KEDAHI ATAN DOLITIK MASYADAKAT		
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT		
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara		
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	kegiatan	
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	kegiatan jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	kegiatan	
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi		
0 7 0 1 0 00	orang	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	orang orang	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara		
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara	orang	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	kasus kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di	orang kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	kasus kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di	kasus kasus kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di	orang kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah sasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasua kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan ang perbatasan antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ka yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan ala desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan perlani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah sasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah hasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ka yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan balar programbah hutan asal desa/kelurahan di	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah hasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ka yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Pajak Target PBB	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Pajak Target PBB	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah indikakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan perbatasing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan perbatasing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang difabi sik antar desa/kelurahan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan pelayan selayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah wajib Pajak Target reltibusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retiribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Majib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis panjadi tugas/kewenangan des	orang kasus tasus kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar pegara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah kepamentah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan perbani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah Tindakan terhadap penungak PBB Jumlah wajib retiribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/k	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Majib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis panjadi tugas/kewenangan des	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah hasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan perpatan/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan penjaripetani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jamlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jamlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewena	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ka yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah Tindakan terhadap penungak PBB Jumlah wajib retiribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan J	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasanya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah Kapib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang dipungut sebagai tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan tahun ini Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah sangketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasanya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jenis Petribusi yang dipungut sebagai tugas/kewenangan desa/kelurahan J	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah sasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi sakera teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang diaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah wajib Pajak B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pengutan resmi di desa/kelurahan Target pengutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di des	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah sasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah sengketa perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan seing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target tertibusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Jum	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah sasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi sakera teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang diaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah wajib Pajak B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pengutan resmi di desa/kelurahan Target pengutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi di des	orang kasus	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat tari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kosha manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah nasalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah kosha kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupatenikota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang dejadi desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupatenikota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah mali penatus penangkapan nelayan dan kewenangan desa/kelurahan B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah mali penduduk yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pertibusi yang dipungut sebagai tugas dan kew	orang kasus casus kasus kasus kasus li jenis li jen	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah salah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah salah ketenagakerjaan di perbatasan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi dasa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan sing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah baria dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jumlah parati politik yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan re	orang kasus dojenis Rp 0,00 0,00 % 2 tindakan 1 jenis 175 orang Rp 224,000,00 100,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus	
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah kasus kejahatan penausa biak luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah saus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kebupaten/kota dan desa/kelurahan tar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan sing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan sing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah haya pengalak pangalak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jenis pajak yang dipungut sebagai tugas kewenangan desa/kelurahan Jenis pertribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pengulan resmi di desa/kelurahan Jenis pungutan resmi dinnya di Desa/Kelurahan Jenis pungutan resmi dinnya di Desa/Kel	orang kasus control one contro	
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah salah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah salah ketenagakerjaan di perbatasan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi dasa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan sing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah baria dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jumlah parati politik yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan re	orang kasus dojenis Rp 0,00 0,00 % 2 tindakan 1 jenis 175 orang Rp 224,000,00 100,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus	
Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kedayatenkota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah sasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kebupatenkota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah hariah yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jamlah Tindakan terhadap penungak PBB Jenis Petribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jamlah Tindakan terhadap penungak pasa/kewenangan desa/kelurahan Jamlah penduduk yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jamla	orang kasus control on	
Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas urum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang dikasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah hasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desas/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik natar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik natar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah kepanal Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petan/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan dandaratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jumlah mala pertibusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target Perbisus yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target tertibusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target tertibusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jumlah permupan dari penduduk desa/kelurahan Jumlah	orang kasus li jenis 4091 orang Rp 0,00 0,00 % 2 tindakan 1 jenis 175 orang Rp 224,000,00 100,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 orang	
Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini Jumlah sasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kedayatenkota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah sasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kebupatenkota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah hariah yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan Jamlah Tindakan terhadap penungak PBB Jenis Petribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jamlah Tindakan terhadap penungak pasa/kewenangan desa/kelurahan Jamlah penduduk yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jamla	orang kasus control on	
Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah kasus partempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan anyang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan pasing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan dinaha keraman mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah palayan penginah pengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa kerungan desa/kelurahan Jumlah penduduk yang menjadi tugas/kewenangan	orang kasus control on	
Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah kasus pertempuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan perbatasan negara tetanga perbatasan negara tetanga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan ini Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan ini Jumlah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. Jumlah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah ingkat atasnya Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang disilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah ke pemerintah Jumlah kasus penangkapan nelayan pasing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah waja penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah waja penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan Jumlah waja pengala tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah pengala tugas desa/kelurahan Jumlah pengala tugas desa/kelurahan Jumlah pengala pengala tugas kewenangan	orang kasus casus kasus kasus casus corang cor	

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan		
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Ditunjuk Perr	nerintah Tingkat Atas
Penentuan Sekretaris Desa		eh Kepala Desa, Dipilih, ı Ditetapkan oleh ota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun		
Masa jabatan Kepala Desa	0 tahun	
, ,	Dituniuk dan	diangkat oleh Camat sesua
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan		venangan dari
4. Pemilihan BPD	1.	
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD	0 orang Dipilih masya	arakat secara langsung
	<u> </u>	<u> </u>
Pimpinan BPD		
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD		
Anggaran untuk BPD		
Produk keputusan BPD tahun ini	Desa 0 kali 3. Rancanga 4. Menyalurk 5. Menyataka Desa 0 kali 6. Menyampa kepada Kepa	n keterangan dari Kepala n Peraturan Desa. 0 buah an aspirasi masyarakat 0 ka an pendapat kepada Kepala siikan usul dan pendapat Ila Desa 0 kali uasi efektivitas pelaksanaan
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada	
Dasar hukum keberadaan Lembaga	Keputusan K	epala Desa
Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang	3 unit organis	·
Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan C	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organis	sasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota		Diangkat oleh Camat
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan Lurah	diangkat oleh Kepala Desa
mplementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK		
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi	0 kegiatan	
anggota LKD/LKK	01 : 1	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	0 kegiatan Tidak	
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya		
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	1	
	_	
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %	
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %	
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	0,00 %	
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK D. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	0,00 %	
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan		4 Izali
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma		1 kali
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah kendariran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan		75,00 % 50,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Masyarakat Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/ kelurahan (kumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termatusun dan lingkungan (kumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan (kumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan (kumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan		75,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK DEPERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah hehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang	isuk di tingkat	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de	unan desa dan	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Geberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK DEPRANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah hehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Relurahan	unan desa dan	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termatusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- orum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	unan desa dan sa dan artisipatif	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya 30,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keebaradaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah kendarian masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Torum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da	unan desa dan sa dan artisipatif	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan Perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun ini, termatusun dan lingkungan (Regiatan administrasi dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan lumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan (Regiatan administrasi dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Pengugunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang orum Musrenbang Partisipatif (Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang palsulan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang palsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan (Pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan dan dimuat da Desa (Regiatan dan sekerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sekusrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan	unan desa dan sa dan artisipatif	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya 30,00 % 0,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK CE. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma Jusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta Perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta Perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profii Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Jeruganan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di decelurahan Jelulan masyarakat dalam pemutakhiran data profii desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jeulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jelulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jeulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas s Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas s Jesulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas s Jesulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	unan desa dan sa dan artisipatif	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya 30,00 % 0,00 %
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keebaradaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termadusun dan lingkungan Jumlah neshadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Torum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Jelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jeulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas selusuhan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas selakelurahan Jeulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas selakelurahan Jeulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat ikatan	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 %
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah mesyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Jelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jeulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas semasyara desa/kelurahan Jeulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas semasyara desa/kelurahan Jeulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan rencana Rembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	unan desa dan sa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 7a Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (Regiatan administrasi perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun ini, termatusun lumlah musyawarah andar Desa dan Musrenbang di desa/kelurahan lumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan (Regiatan perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Dengunan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang-orum Musrenbang Partisipatif (Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam musrenbang di dekelurahan (Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang dekelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang dekelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang dekelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang desa/kelurahan (Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data sektoral dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sektoral dalam perencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak da	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah nebadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Reliurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas semasyara desa/kelurahan Jusulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang diusulkan ke pemerin	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 7a Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKKK (kegiatan amsyarakat dalam membangunan tingkat dusun/lingkungan dan datahun ini, termatusun dan lingkungan dan desa/kelurahan Lkumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan (kelurahan LKD/LKKK) (kepiatausahaan LKD/LKK) (kepiatausahaan LKD/LKKK) (kepiatausahaan LKD/LKK) (kepiatausahaan LKD/LKK) (kepiatausahaan LKD/LKKK) (k	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak 0 kegiatan
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK CE. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Iumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma tusun dan lingkungan Iumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Iumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Iumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Iumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Iumlah peserta Perempuan dalam Musrenbang di desa/kelurahan Iumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profii Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Jaulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jaulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dalam Musrenbang palsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jaulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jesulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas salusan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPAD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPAD/K) Pemilikan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPAD/JK) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat ikatan intuk dibiayai di APB-Desa, suai dengan	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak Tidak 0 . kegiatan 0 . kegiatan
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK (keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKKK (kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKKK (kegiatan administrasi perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termatusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam Setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang partisipatif Penglibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se dusarenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan APB-Desa, suai dengan serenbang pemerintah	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak Tidak 0 . kegiatan 0 . kegiatan
Relirasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Kepiadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK Cegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di dekelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang Delibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan Pelibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas sembagai dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara desa/kelurahan Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan (RP/MD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas selasi ikusenbang Jumlah kegiatan yang diisakana	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan APB-Desa, suai dengan serenbang pemerintah	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak Tidak 0 . kegiatan 0 . kegiatan
Kelurahn/APBD Kealisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de Kelurahan Jelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang di de Kelurahan Jeulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat da Desa Jisulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas se Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyara Jesulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RRJMD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RPJMD/K) Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas u dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi. Jesa/kelurahan J	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di APB-Desa, suai dengan serenbang pemerintah h ada sesuai	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak 0 . kegiatan 0 . kegiatan
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Reberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK Regiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma Jusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- rorum Musrenbang Partisipatif Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang- rorum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de- Relibatan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Provinsi dan pusat yang dibahas se Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan (RKPD/K) Pemilikan Rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) Pemilikan dokumen Apa	unan desa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di APB-Desa, suai dengan serenbang pemerintah h ada sesuai	75,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 74 Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak 0 . kegiatan 0 . kegiatan
Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Jrusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK Cegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terma dusun dan lingkungan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembang Forum Musrenbang Partisipatif Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di de kelurahan Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang p Jusulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jusulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan pangka kemasyara desa/kelurahan Jusulan Rencana kerja peremintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RR/DJ/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RR/DJ/K) Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RR/DJ/K) Pemilikan dokumen Penbangunan Jangka Menengah Desa/	unan desa dan sa dan sa dan sartisipatif lam RAPB- saat skatan untuk dibiayai di APB-Desa, suai dengan serenbang pemerintah h ada sesuai	75,00 % 50,00 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % Ya Ya Ya 30,00 % 0,00 % 0 kegiatan Tidak Tidak Tidak 0 kegiatan 0 kegiatan

weight accided to the company of the	Untitled Document	
seitler des Aug de State of State (1997) aug de la company de la compa	Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang	Ada
Jacksons audukannya. Protest price protesting performance protesting of a prot	sudah ada Pelaksangan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang helum diselesaikan oleh	
semenyarization desableutanta reposal regular Devision. Larger Servision of inguisi desabelisation of inguisi desabelisation of inguisi desabelisation of inguisi desabelisation. It Industrial security and interest begalar merganization under interest begalar merganization personal	pelaksana sebelumnya.	Ada
Juntah basas prompregarp peksaranan jendranganan yang destesahan di langkal desebelarahan Di saus in tanah basas prompregarp peksaranan jendran punterujan desebatahan yang destesahan soora hukanan Di saus in tanah basas prompregarp peksaranan jendrangan peksaranan jendrangan peksaranan jendrangan peksaranan penterujan penterujan desebatahan yang desebatahan yang desebatahan penterujan penterujan desebatahan yang desemberah penterujan penteruja		0 kasus
inters keption mayopatur umb, metastarkan nasi pembanyumnyang discontinuation pembanyan disakankan pembanyan disakankan pembanyan disakankan pembanyan disakankan pembanyang disakankan pembanyangan disakankan pembanyangan disakankan pembanyangan disakankan pembanyangan pembanyanga	Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
June in beginn of the data the start plant and profession of the Marchane (1998) of the start plant and profession of the Marchane (1998) of the Start plant and profession of the Start plant and the Start p	Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	
Jurish in Egiption of George Care beautiners yang disease dari APD Devent Notacupstervicks Jurish Institute State of the		
Jumph Internit Programs of Seas den Internation young distoral den AMPD Process J. Samangar Kagothongroyangan Frenducks Jamangar Kagothongroyangan Frenducks Jumph Internit Proceducks menjad Kagothongroyangan Frenducks Jumph Internit Proceducks menjad Grang bas samb Jumph Internit Proceducks menjad Grang Jumph Internit Proceducks menjad Jumph Internit Proceducks menjada		
Semangair Kegotongroyongan Penduduk Limith Intropop arisen Limith propops arisen Limith	Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	
Jumb historiped carea Immit historiped carea Mind production mysel orang bus aush Mind production mysel orang bus aush Mind blocky does safetia Mind blocky beginden geforeg copying data sambatervejerierity delang membagnuan numb Mind blocky beginden geforeg copying data sambatervejerierity delang membagnuan perdician mark selohibulushukurus Mind block september geforeg copying data sambatervejerity delang membagnuan perdician mark selohibulushukurus Mind block september geforeg copying data sambatervejerity delang membagnuan fastilas unum dan fastiliss Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fastiliss unum dan fastiliss Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fandis usuhan Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fandis usuhan Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberan fastiliss unum dan sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberan fastiliss unum dan sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberangsipan selection between the sambatervejerity delang merangsipan selection between the sambatervejerity delang memberan fastiliss selection and selection sele	Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan
Jumb historiped carea Immit historiped carea Mind production mysel orang bus aush Mind production mysel orang bus aush Mind blocky does safetia Mind blocky beginden geforeg copying data sambatervejerierity delang membagnuan numb Mind blocky beginden geforeg copying data sambatervejerierity delang membagnuan perdician mark selohibulushukurus Mind block september geforeg copying data sambatervejerity delang membagnuan perdician mark selohibulushukurus Mind block september geforeg copying data sambatervejerity delang membagnuan fastilas unum dan fastiliss Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fastiliss unum dan fastiliss Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fandis usuhan Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang memberan fandis usuhan Mind blocky september geforeg copying data sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberan fastiliss unum dan sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberan fastiliss unum dan sambatervejerity delang merangsipan site was den keburu Mind blocky september geforeg copying memberangsipan selection between the sambatervejerity delang merangsipan selection between the sambatervejerity delang memberan fastiliss selection and selection sele	2. Companyat Kanadannya yangan Banduduk	
Jurish penoduk meglad carag ta asah di daktakya kagalan pating proposa dasa pembahankan penahanya kagalan pating polong royang dasa pembahankan perintya dalam pembahankan manih da daktakya kagalan pating polong royang dasa pembahankan perintya pembahan pe		buah
Add Schlerys kegidien götting protong stores gentralen/neigenranye dilam pendiphan manih dia didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendiphan manih dia didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendibayan pendidahan anak ediosh/shain/sharusu dia didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendibayan pendidahan anak ediosh/shain/sharusu dia didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendipanan manih anak dida didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendipanan modal usaha dia didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendipanan kendi an indin anak dida didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendipanan kendi an indin anak didayan kegidien gobing rovong albu santshain/neigenranye dilam pendipanan kendi anak dilam kendilam dilam dilam berindah kendilam dida didayan kepidien gobing rovong menjaga keberahan Desakfaurahan dia didayan kepidian gobing rovong menjaga keberahan Desakfaurahan dia didayan kepidian gobing rovong menjaga keberahan Desakfaurahan dia didaknya kepidian gobing rovong menjaga keberahan Desakfaurahan dia didaknya kepidian pendipanan didayan dilam pendipanan dilam pend	Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	
ikda Sidariya kapilatan gioteng rivorga alau sambalan/nejerinnya dalam pertapakan turan Mada Sidariya kapilatan gioteng rivorga alau sambalan/nejerinnya diana pembalanan fenilisa unum dan fasilisa Mada Sidariya kapilatan gioteng rivorga alau sambalan/nejerinnya diana pembalanan fasilisa unum dan fasilisa unum dan fasilisa Mada Sidariya kapilatan gioteng rivorga alau sambalan/nejerinnya diana pemberisan molala suhan dan sidari sambalan dan sidari sambalan sidari sambalan/nejerinnya diana pempelajan awawil dan sidari sambalan dalam sidari sambalan/nejerinnya diana pempelajan awawil dan sidari sambalan dan sidari sambalan/nejerinnya diana pempelajan awawil dan sidari sambalan/nejerinnya diana mengapa kelebihan, kelentahan pempelan sawah dan sidari sambalan/nejerinnya diana mengapa kelebihan, kelentahan dan sidari sambalan/nejerinnya diana mengapa kelebihan kelentahan dan sidari sambalan/nejerinnya diana mengapa kelebihan sekeritahan dan sidari sambalan/nejerinnya diana menjapa kelebihan sekeritahan sambalan/nejerinnya diana pembalan/nejerinnya diana seria sambalan/nejerinnya diana pembalan/nejerinnya diana seria sambalan/nejerinnya diana pembalan/nejerinnya diana pembalan/nejerinnya diana seria sambalan/nejerinnya diana seria sambalan/	Ada tidaknya dana sehat	
ika diskanya kinjalan gibrang yanga atau sambalanningeranya dalam pembagana pendidahan anak selabah/kalanhukrasak diskaskaya kejalah pembagan perdapan dari sahah dalah diskanya kejalah pembagan dari sahah dalah diskanya kejalah pembagan bergangan sahah pembagan pembagan bergangan dari sahah dalah diskanya kejalah pembagan pembagan pembagan pembagan bergangan sahah pembagan pembagan bergangan sahah pembagan pembaga		-
ikda fisidanya kegilatan gioteng proyeng akus sambalanniapensnya dalam pemelahan pendarian melahan dari dari dari dari dari dalam dalam pendarian melahan pendarian melahan dari dari dari dari dari dari dari dari		+
ikas flokkinys kogialen gelong prograg aku sambalanniapeninya dalam pemberian modal unaha Madi didaknya kogialen golong royong aku sambalanniapeninya dilam penegahan sawah ikan kelam dalam penegahan sawah mengapa kelam dan kelam dida kelam pengapan penegahan sawah kelambalannia dalam penegahan sawah kelambalannia dan kelam dalam pengaban kelam dalam kelam dalam pengaban kelam	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas	
Mas Indexinya kegalahan galeng nyong alau sambatan-lepinersaya dalam penegipaan awah dan keban dada didakon penegipaan galam penegipaan dari dan usuhap beremakan lahinya dada idako didakon penegipaan dadam penegipaan dari dan usuhap beremakan lahinya dada didakon penegipaan dadam penegipaan dari dan usuhap beremakan lahinya dada didakon penegipaan galam penegipaan dari dalam penegipaan penegipaan penegipaan dari dalam penegipaan penegipaan penegipaan penegipaan penegipaan penegipaan dari dalam penegipaan penegip		
As discharys kegisten gotong royong alau sembatan-injerinenya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya (
Ada Editarya kegistan gotong royong abas sambatanin-giarkanya dalam perifitiva kerentan Ada Editarya kegistan gotong royong membagan islanjenbataninahan artingas Ada Editarya kegistan gotong royong membangan islanjenbataninahan artingas Ada Editarya kegistan gotong royong membangan islanjenbataninahan artingas Ada Editarda Kada Islandad dalam perkawinan Ada Islandad dalam pusacara kematuan Ada Islandad dalam pengadikan batapertakan Ada Islandad dalam pengadikan batapertakan Ada Islandad dalam pusacara kematuan Ada Islandad dalam pengadikan batapertakan Ada Islandad dalam mengadikan batapertakan Ada Islandad dalam mengadikan batapertakan Ada Islandad dalam pengadikan batapertakan berbatapertakan berbatapertakan berbatapertakan batapertakan	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	
Mas disablays keiglating golong proyang menjaga kebersahan Desa/kelurahan Mad disablays keiglating golong proyang alaba sembatan-kejerisinya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan agangnyamuk kan kesehatan agangnyamuk kegidan golong royang alaba sembatan-kejerisinya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan agangnyamuk kan kesehatan agangnyamuk kan kesehatan agangnyamuk kan kesehatan agangnyamuk kan kesehatan agangnyamuk dan kesehatan anak dada tisabad dalam pengajolasan hutun Kati sitabad daham pengajohatan hutun kemajan aratan adan semesta dengan manusia dan ingkungannya dada tisabad daham mempalahan balap panyat dan berapa anak distribut dari sitabad daham pengajohatan hutungan aratan adan semesta dengan manusia dan ingkungannya dada tisabad daham pengajohan hutungan aratan adan semesta dengan manusia dan ingkungannya dada tisabad daham pengagdiangan keristahatapak keluang daka manguhakan bangkangnya dalam dalam balam dan dalam balam dalam	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	
Add biddeyes kogethern godong roycong membehani periperiperibentahaharan antringsal Add biddeyes kogethern godong roycong abau sambabani-bejeninnya dalam pemberantahasan sarang nyamuk dan kecehahan rejeninnya laimnya Add biddeyes dalam perkesarian Add bidded dalam pengedikan hutuhan Add bidded dalam manah pentahanan Add bidded dalam manah pentahanan adam samah samahanan adam samahan samaha	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	
As didays kegidan golong royong alau sambatanisejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ingingangan lainya pendukunan kata istaladad dalam perlawinan kata istaladad dalam perlawinan kata istaladad dalam pengelakan nutuan kata istalada dalam pengelakan nutuan kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dan bencena alam kata istalada dalam mengaluhian bias penyakti dalam mengaluhian bias penyakti dalam mengaluhian bias penyakti dalam bias penyakti d		-
Index plant parksyrota Valid I stabell databat Valid I stabell databa	Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran an/ingasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan	1
Adda Islanda dalam uppertawanna Adda Islanda dalam uppeara kemantan Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam mempelipatan itulipatan Adda Islanda dalam mempelipatan tanubpatan Jahah Bandara Adda Islanda dalam mempelipatan tanubpatan adara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara adara adam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara adam pasar Perintah-Indha sumpangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan tercangan dalam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis Pemintah penis pungutan dari PT atau sebubah ada mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah sala dalam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis penis penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam bandara sebubah salam penis pungutan dalam penis pungutan dalam penis pungutan sebubah salam bandaran sebubah salam penis pungutan sebubah salam sebubah salam sebubah salam penis pungutan sebubah sebubah salam sebubah sebuba	lingkungan lainnya	-
Adda Islanda dalam uppertawanna Adda Islanda dalam uppeara kemantan Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam tanah portariam Adda Islanda dalam mempelipatan itulipatan Adda Islanda dalam mempelipatan tanubpatan Jahah Bandara Adda Islanda dalam mempelipatan tanubpatan adara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara alam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara adara adam semesta dengan manusa dan lingkungannya Adda Islanda dalam penanggulangan kemakanatan Bandara adam pasar Perintah-Indha sumpangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan percangan dari rumah kerumah 1 1 - Peminta-Indha sumbangan tercangan dalam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis Pemintah penis pungutan dari PT atau sebubah ada mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah sala dalam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam mencaru ang secara gampang walau Islankan 1 0 penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis penis penis penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam penis pungutan dari PT atau sebubah salam bandara sebubah salam penis pungutan dalam penis pungutan dalam penis pungutan sebubah salam bandaran sebubah salam penis pungutan sebubah salam sebubah salam sebubah salam penis pungutan sebubah sebubah salam sebubah sebuba	A Adot Intindat	
Add is ideal data dam perpara kematan Add is ideal datam perpara kematan Add is ideal dalam mengelukhan lautpental Add is ideal dalam mengelukhan lautpental Add is ideal dalam mengelukhan batap perpadi dan bencana alam Add is ideal dalam mengelukhan batap perpadi dan bencana alam Add is ideal dalam mengelukhan batap perpadi dan bencana alam Add is ideal dalam mengelukhan batap perpadi dan bencana alam Add is ideal dalam mengelukhan batap perpadi dan seneraba dengan marusis dan ingkungannya Add is ideal dalam permangalangan kemidikan dang betangan disudi mengelukhan dang batap Add is ideal dalam permangalangan kemidikan dang betangan disudi pelanan Juriah jenis pungulam isar da termina pelabuhan dan pasar Perintah perintah sumbangan peroparagan dari rumah ke rumah Perintah perintah sumbangan perbangan perbangan dari rumah ke rumah Perintah perintah sumbangan perbangan dari rumah ke rumah Perintah perintah sumbangan perbangan perbangan dari rumah ke rumah Perintah perintah sumbangan perbangan perbangan dalam perintah perinta		
Add istinated adam uppecarsa kennatan Addi istinated adam penjeolasan hutuna Addi istinated adam penjeolasan hutuna Addi istinated adam penjeolasan hutungharia Adam penjeolasan penjeolasan dari mumah hutungharia Adam penjeolasan penjeolasan dari mumah hutungharia Adam penjeolasan penjeolasan hutungharia Adam penjeolasan penjeolasan hutungharia Adam penjeolasan penjeolasan penjeolasan dari penjeolasan	Adat istiadat dalam kelahiran anak	
Add teilsdard dalam tanah pertanian Add teilsdard dalam mempocilaani autophania Add teilsdard dalam mempocilaani autophania Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana alam Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana alam Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana alam Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana alam Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana alam Add teilsdard dalam mempaukan bara penyatid dan bencana pata alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Addi teilsdard dalam ananggulangan kentikanbang keluang datah mampurlahr miskentertantar S. Sikap Dan Mental Masyarakat unitah jenip pungutan liar di terminat, pelabuhan dan pasar O penis unitah jenip pungutan liar di terminat, pelabuhan dan pasar O penis Penisah bencanggan perkerangan dan turah ke rumah Terminat-minta sumbangan perkerangan dari rumah ke rumah I penisah pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Denis bensa pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari RT atau sebutan hain kepada warga Lense pungutan dari desakeluriahan kepada warga Lense pungutan dari desakeluriahan kepada warga Lense pungutan dari pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus belana pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus belana pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipundari kerana kenak kasus pungutan liar, pemerasan	Adat istiadat dalam upacara kematian	
Add Island dalem pengelolana lautyanntal Mada Island dalem mencahaha Rothik warga Mada Island dalem menguhakha bala penyakit dan bencana alam Mada Island dalem menguhakha bala penyakit dan bencana alam Mada Island dalem menguhakhan bala penyakit dan bencana alam Mada Island dalem menguhakhan bala penyakit dan bencana alam Mada Island dalem dalem Magadan menguhakhan menguhakhan bengan pengangan antara alam semesta dengan manusia dan Ingkungannya Mada Islandak dalem penanggalangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampuripakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Wilmish jenip pungutan ilar dan anak gelandangan di sudul jalanan Ojenis Jurnish jenip pungutan ilar dan anak gelandangan dan pasar Ojenis Jurnish jenip pungutan ilar dan anak gelandangan dari rumah ke rumah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	
Add Island delam memocahan korfilik warga Add Island delam memojulikan bala penyakit dan bencana alam Add Island delam memojulikan hala penyakit dan bencana alam Add Island delam memojulikan hala penyakit dan bencana alam Add Island delam memojulikan hala pensikan halay keluanga tidak mampurliakir miskin/terlantar S. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumfah jenis pungutan ilar dan ank gelindangan di sudul jalanan O jenis Jenis punguhan ilar di terminal, pelakuhan dan pasar O jenis Jenis penguhan dan dan anka gelindangan di sudul jalanan I seminah-mita sumbangan peroparagan dari rumah ke rumah Terminah-mita sumbangan peroparagan dari rumah ke rumah I seminah-mita sumbangan peroparagan dari rumah ke rumah I seminah-mita sumbangan peroparagan dari rumah ke rumah Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari RT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari KT alau sehatan lain kepada warga Jenis punguhan dari kesakan punguhan lain kepada warga Jenis punguhan kesakan banga bangan dari kehatan punguhan lain pemesaan dan sejenisnya Jenis punguhan kesakan bangan bangan bangan dari kehatan punguhan pensah dari bangan bangan kehada bangan bangan kebandah kehampunguhan bangan kebandah masyarakan pensahan bangan penyakan galakan bangan pensahan dari bangan bangan kebandah masyarakat pangan bangan bangan kebandah masyarakat pangan bangan bangan kebandah masyarakat pangan bangan kebangan bangan kebangan bangan bangan bangan bangan bangan banga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+
Add istakad dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adda Istakad sidaka dalam penanggulangan kemiskanahagi keluanga bidak mangunfakir miskin/terlantar	Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	
Add i disadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluanga bidak mampurfakir miskin/terfantar Sikap Dan Mental Masyaraktal	Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	
S. Sikap Dan Mental Masyarakat Jurniah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jo jenis Jurniah jenis pungutan liar di terminah, pelabuhan dan pasar Ojenis Pernina-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah O semakin benkembang prakkis jalan piriats dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal O jenis Pernina-minia sumbangan berograshasi dari rumah ke rumah O jenis Pernina-minia sumbangan berograshasi dari rumah ke rumah O jenis Penins pungutan dari RT atsu sebutan lain kepada warga Dienis pungutan dari RT atsu sebutan lain kepada warga Dienis pungutan dari RT atsu sebutan lain kepada warga Dienis pungutan dari dasakbuhan ban kepada warga Beris pungutan dari RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Casus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dienis india parakan kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienis india dan dari dari dari dari dari parakan sebagai uang rokok atau usapan terima kasih dalam Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jue, pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi karana kasus pungutan liar jueratasi dari pemerasan dan sejenisnya Dienizutasi dari dari dari dari dari dari dari dar	Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di suduk jalanan Jumlah jenis pungutan liar di termina, pelabuhan dan pasar Perinta-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Perinta-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah O Semakin berkembang prakok jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal O Jenis Perintia-minia sumbangan berograsias dari rumah ke rumah O Jenis pungutan dari R dau sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari R dasu sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari RW atau sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari desakbuharha kapada warga Lenis pungutan dari kawa bebutan liannya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Di	Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinandagi keluarga tidak mampu/takir miskin/teriantar	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di suduk jalanan Jumlah jenis pungutan liar di termina, pelabuhan dan pasar Perinta-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Perinta-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah O Semakin berkembang prakok jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal O Jenis Perintia-minia sumbangan berograsias dari rumah ke rumah O Jenis pungutan dari R dau sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari R dasu sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari RW atau sebutan lian kepada warga Lenis pungutan dari desakbuharha kapada warga Lenis pungutan dari kawa bebutan liannya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimidasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Di	5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Perintia-minia sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Perintia-minia sumbangan berografisasi dari rumah ke rumah O Perintia-minia sumbangan berografisasi dari rumah ke rumah O Perintia-minia sumbangan berografisasi dari rumah ke rumah O Perintia-minia sumbangan peraksi sidar puntak sumban mencari uang secara gampang walau tidak halal O Penis punguhan dari R dasu sebutah lain kepada warga Lenis punguhan dari R dasu sebutah lain kepada warga O Penis lenis punguhan dari R dasu sebutah lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O Kasus aparat R / (RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O Kasus Jipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya O Nasus Dimidasi karana kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya D Nasus D Nasus dipangutan dina kasus kasus pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya D Nasus dipangutan dina pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya D Nasus dipangutan dina pungutan liar, pemerasan dina sejenisnya D Nasus dipangutan dina pungutan liar, pemerasan dina sej	Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Permitan-minta sumbangan terkorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktik kilan pintas dalam menorai uang secara gampang walau tidak halal 0 peris pungutan dari RV atau sebutan lain kepada warga 0 penis pungutan dari RV atau sebutan lain kepada warga 0 penis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga 0 penis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga 0 penis pungutan dari KW atau sebutan lain kepada warga 0 penis pungutan dari KW atau sebutan lainnya di desa dari kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus sepantikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 piloridah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 piloridah karena darinah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 piloridah karena darinah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 piloridah karena darinah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 kasus 0 piloridah karena darinah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 kasus 0 ka	Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	+ -
Semakin berkembang prakék jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal 0 0 olenis pungutan dari Tri dau sebutan lain kepada warga 0 olenis olenis 0 olenis olenis 0 olenis olenis 0 olenis olenis olenis 0 olenis olenis		_ `
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga		
Jenis pungulan dari desarkelurahan kepada warga Saus aparta RT/RW atus usebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipirdah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipirdah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipirdah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipirdah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipirdah karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipirdah karena darinistrasi di karont desa-kelurahan Jarnyak karga yang ingiri mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa-kelurahan Jarnyak karga yang ingiri mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa-kelurahan Jarnyak kengutan yang mengelukhan memburuknya kualilas pelayanan kepada masyarakat Dipirdah karena dipirdah dari dari dari dari dari dari dari dari	Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	
Saus aprait RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejeninsnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejeninsnya O kasus Dibindah karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejeninsnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejeninsnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya O kasus Dimutasi penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan pada musur etnis, agama dan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok dasprak kalahan pada musunga pada kelenan pemalahan yang tidak dimanfaatkan O kasus Wilayah DesarKelurahan sangat lusa O barayak hahan beraharan yang tidak dimanfaatkan O barayak hahan beraharan yang tidak dimanfaatkan O barayak penduduk yang meman pada musun pada musun pada musun tidak menampanen yang parah dan tidak mencari pekerjaan lain O barayak penduduk yang menani pekerjaan di laid kasa kelerahan telahan pada musun kapatan pada musun ka	Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	+-
Sejenisnya Okasus	<u> </u>	0 jenis
Dipindah karena kana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Okasus	Kasus aparat KT/KW atau sebutan lainnya di desa dan keluranan yang dipecat kena kasus pungutan ilar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Jimulasi karena kasus punjutan ilar, pemerasan dan sejenisnya Janyak masyarakat yang memberikan hisya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam Janyak megarakat yang memberikan hisya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam Janyak penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Janyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Janyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Janyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Janyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Janyak kanga kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok eperinigan lain Janyak bahan bersahan angat luas Janyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Janyak lahan bersarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Janyak lahan bersarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Jumlah pelani pada musim tidak melaut yang memarifaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain Janyak penduduk yang menari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang menari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang menari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang menari pekerjaan di kota basar lainnya Janyak penduduk yang menari pekerjaan di kota basar lainnya Janyak penduduk yang menari pekerjaan di kota hari menuntut pengalah kebutuhan dasar sembilah bahan pokok pada Janyak penduduk yang menari pekerjaan kebarahan yang baryak debiasan mesyarakat untuk menari/mengumpulikan bahan makanan pengganti bersa/jagung pada saat rawan Jangar/kebaparan/gaga panen Janyak penduduk yang menari pemerintah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Janyak penduduk yang men	Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	
Sanyak masyarakat yang memberikan hisya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam zorese pelayanan administrasi di kantori desakefuruhanan 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	
singses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan alanyak wanga yang ingin mendapatkan pelayanan qratis dari aparat desa/kelurahan 1 anganyak wanga yang ingin mendapatkan pelayanan qratis dari aparat desa/kelurahan 1 anganyak kepianan yang bersifat hiburan dan rekreasa yang diinisiafiti masyarakat sendiri 2 danyak kerjanan yang bersifat hiburan dan rekreasa yang diinisiafiti masyarakat sendiri 3 danyak kerjanah yang bersifat hiburan dan rekreasa yang diinisiafiti masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain 5 desa Kerja Penduduk 2 desa Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas 8 anyak lahan berantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 8 anyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 8 anyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan 9 anyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan 9 alurahah pelayan pada musim gagal tanam/panen yang pasah dan didak mencari pekerjaan lain 9 alurahah pelayan pada musim didak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keshilan lainnya untuk mencari pekerjaan iain 9 alaryak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar laimya 1 debiasaan masyarakat marayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 2 debiasaan masyarakat untuk merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 3 debiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 4 angan/kelaparan dan kekeringan 4 cebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 5 angaarkelaparan dan kekeringan 5 cebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 6 angaarkelaparan dan kekeringan 6 cebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 7 angaarkelaparan dan kekeringan 8 cebiasaan masyarakat turuk mencari pekapatakan 9 angaarkelaparan dan kekeringan 9 cebiasaan masyarakat turuk mencari pekapatakan berbagai percapatan berbagai di ing	, , , ,	
Sanyak kepalatnyang bersifat hiburan dan rekreasi yang dinisiatifi masyarakat sendiri 0 Sanyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang dinisiatifi masyarakat sendiri 0 Sanyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang dinisiatifi masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok ependingan lain 0 Sanyak kalan bersangan di sekitar perumahan yang tidak dinanfastan 0 Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0 Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0 Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0 Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0 Sanyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfastan 0 Sununiah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0 Sununiah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfastakan keterampilan/keshilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 0 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di but desa/kelurahan masih dalam wilayah kabupaten/kota 2 Sanyakata tering mendatangi kentor desa dan lurah menuntut penyediana kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aka kelaparan dan kekeringan dan kekeringan dan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aka kelaparan dan kekeringan dan kebutuhan dasar sembilan bahan pakering	proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Samyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok dependingan lan Samyak lahan persima dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok Samyak lahan berlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi O Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi O Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi O Sanyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan O Unurlah petani pada musim gagal tanam/paene yang pasarah dan tidak mencari pekerjaan lain O Unurlah petani pada musim gagal tanam/paene yang pasarah dan tidak mencari pekerjaan lain O Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya O Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya O Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya O Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya O O Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya O O O O O O O O O	Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas 3 0 3anyak lahan besa/Kelurahan sangat luas 3 0 3anyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 3 0 3 3anyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 3 1 3 3anyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3		
Etos Kerja Penduduk uas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas annyak lahan telarlartar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi annyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 3 anyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 3 olumlah petan jada musim gagat tanamipanen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 4 olumlah petan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 5 olumlah petan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 6 olumlah petan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 7 olumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 8 olumlah petan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan undangan yang banyak kabupaten/kota 9 olumlah pedan pada musim tidak melaut yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 9 olumlah pedan dalam jumlah besar untuk menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada baak kelaparan dan kekeringan 9 olumlah petan pada musim tidak mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen 9 olumlah kelaparan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu 9 olumlah kepiasaan masyarakat berdemonstras/protes terhadap kebijakan pemerintah 9 olumlah kepiasan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 9 olumlah kepiasan masyarakat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi 9 olumlah kegiatan 1 olumlah kegiatan 1 olumlah kegiatan 1 olumlah kegiatan 1 olumlah kegiatan 2 olumlah kegiatan 3 olumlah kegiatan 4 olumlah kegiatan 5 olumlah kegiatan 5 olumlah kegiatan 6 olumlah kegiatan		
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Onanyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 1 anyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 1 anyak lahan todur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan Onumlah petani pada musim gagal tanam/pamen yang parah dan tidak mencari pekerjaan lain Onanyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kata besar lainnya (Pebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirikan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilah bahan pokok pada Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kata besar lainnya (Pebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Jangan/kelaparan/gagal pamen (Pebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Jangan/kelaparan/gagal pamen (Pebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menye	kepéntingan lain	U
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Onanyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 1 anyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 1 anyak lahan todur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan Onumlah petani pada musim gagal tanam/pamen yang parah dan tidak mencari pekerjaan lain Onanyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kata besar lainnya (Pebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirikan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilah bahan pokok pada Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kata besar lainnya (Pebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Jangan/kelaparan/gagal pamen (Pebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulikan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Jangan/kelaparan/gagal pamen (Pebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Pebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menye		
Sanyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Sanyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan 1 anyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan 0 Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0 Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0 Jumlah petani pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 3 Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kuta besar lainnya 4 Sebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 0 Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada baat kelaparan dan kekeringan 6 Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 2 Jangari/kelaparan/gagal panen 6 Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 6 O Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 7 O Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 8 O Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 9 O Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 9 O Kebiasaan masyarakat terprovekasi karena isu-isu yang menyesatkan 1 O Kebiasaan masyarakat permentah desarkelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya 1 O Kebiasaan para pemerintah desarkelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat 1 O Kebiasaan para pemerintah desarkelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat 1 O Kebiasan para pemerintah desarkelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat 1 O Kepengurusan 1 O Kada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ln .
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Janyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan O Jumlah petani pada musim gagat Inami'panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain O Jumlah pelayan pada musim didak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Aebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Alasayarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada asat kelaparan dan kekeringan Aebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Aebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Aebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Aebiasaan masyarakat berrdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah O Aebiasaan masyarakat berrdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah O Aebiasaan masyarakat termusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan O Aebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya Aebiasaan yang dihadapi masyarakat bermusyawarakatan ALEMBAGA KEMASYARAKATAN ALEMBAGA KEMASYARAKATAN ALEMBAGA KEMASYARAKATAN B. RUKUN Tetangga (RT) Ada Ada dan Aktif Bauku Administrasi O O Jumlah kegiatan Ada dan Aktif Bauku Administrasi O Ada Ada dan Aktif Bauku Administrasi O Jumlah kegiatan Ada dan Aktif Bauku Administrasi O Jumlah kegiatan	Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0 0 Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain 0 0 Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 1 Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 0 Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan (Cebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Mesiasaan sayarakat terpadakan penganti keneras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen (Cebiasaan masyarakat bermusyawara untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu 0 Mebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Cebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menerakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 0 Mebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 1 Mebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya 0 Mebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat Menasyarakat 0 Mebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan besa dan Kelurahan/LKD/LK Tidak Mumlah kegiatan Jenis Mada Menasyarakatan Menasyarakata	Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	1
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desai/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Janyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya (Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Janat kelaparan dan kekeringan (Abasarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Janatak kelaparan dan kekeringan (Abasarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal pane (Abiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengaan upacara tertentu Ocebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah (Abasara masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Abiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Abiasaan masyarakat permerintah desai/kelurahan tutuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakatan Desai dan Kelurahan/LKD/LK (Abiasaan aparat pemerintah desai/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan	Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 1 3 3 anyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 6biasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan 6biasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen 6biasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan 0 (Aebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan 20 angan/kelaparan/gagal panen (Aebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu 0 (Aebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah 0 (Aebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan 0 (Aebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 1 (Aebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 1 (Aebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya 0 (Aebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	
saat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti berasi/jagung pada saat rawan angan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu O Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Cebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesalkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan O Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesalkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan 1 Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Cebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Rukun Tetangga (RT) Ada Ada dan Aktif Buku Administrasi Jumlah kegiatan Ada dan Aktif Buku Administrasi Jumlah kegiatan 6 Jenis Jumlah kegiatan 6 Jenis		+
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen (kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu (bebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah (bebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (bebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (bebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (bebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (bebiasaan parat pemerintah desar/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya (bebiasaan aparat pemerintah desar/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi (besulitan yang dihadapi masyarakat (berada) (bera	Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilah bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0
Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Sangar Panem Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Bunlah kegiatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Adan Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Ada Adan Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Adan Aktif Bunlah kegiatan Agarakatan Ada Adan Aktif Bunlah kegiatan Ada Ada Adan Aktif Bunlah kegiatan Ada	Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah (Aebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Aebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Aebiasaan aparat pemerintah desar/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan sekitarnya (Aebiasaan aparat pemerintah desar/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi (Asia terlebih di		
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Aebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Aebiasaan masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Aebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat (ALEMBAGA KEMASYARAKATAN (ALEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (ALEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURA	Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi cesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan Jenis B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Ada dan Aktif Suku Administrasi Jumlah kegiatan Ada Ada Kepengurusan Ada Ada Ada Kepengurusan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada A	Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jenis B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. Rukun Tetangga (RT) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi O Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada dan Aktif Buku Administrasi O Jumlah kegiatan	Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	
KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan C. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi Jumlah kegiatan Ada dan Aktif Buku Administrasi		
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Kepengurusan Ada dan Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Gepengurusan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Ada Ada Aktif	kesulitan yang dihadapi masyarakat	V
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Kepengurusan Ada dan Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Gepengurusan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN Ada Ada Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Ada Ada Aktif Bukuh Administrasi Jumlah kegiatan Ada Ada Ada Aktif	VII I FNDA CA KENA OVA DA KATAN	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Tidak Jumlah kegiatan Jenis B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN T. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis		
Jumlah kegiatan	Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
1. Rukun Tetangga (RT) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis	Jumlah kegiatan	
1. Rukun Tetangga (RT) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis		
Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis	B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Ade
Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis 2. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis		
Jumlah kegiatan 6 Jenis 22. Rukun Warga (RW) Ada Kepengurusan Ada dan Aktif Juku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis	Buku Administrasi	
Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis	Jumlah kegiatan	6 Jenis
Kepengurusan Ada dan Aktif Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis		
Buku Administrasi 0 Jumlah kegiatan 6 Jenis		
Jumlah kegiatan 6 Jenis		O AKUI
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ada	Jumlah kegiatan	6 Jenis
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ada		
	3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Ada

sou Administrated © Jers Autor Natura personalisan Lennings Enrangemakana Data and Takara personalisan Lennings Enrangemakana Data and Takara personalisan registrate Prisa and Takara personalisan registrate arregists lennings desired and selected	Untitled Document	
And Protein professional in Consign Simonycrisheder Disas And Protein Protein Simonycrisheder Disas And Disas	Kepengurusan	
asas Tulum peribentikan Lentaga Kemayarakan Desa asar Tulum peribentikan biranga kemayarakan Hulianian II. PEMERITAHAN DESA DAN KELURAHAN AMB Desa dan Anggaran Keunga dan perimenan Besakfaurahan antan ini mentah peripentikan Marahan Terih peripentikan desa dan Kelurahan AMB Desa dan Anggaran Keungan TERO Lidaspelan Koda Tulum Besakfaurahan antan ini mentah peripentikan Peribentikan Tero Lidaspelan Kelurahan TERO Lidaspelan Kelurahan Berakkan Kelurahan TERO Lidaspelan	Buku Administrasi Jumlah kegiatan	
as in human persibentials in companion arranged a lembaga hemosy availation data dain haluschans II. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN APPS Chees dan Angagaren Kelurahan Territoria angagaren Esteria dan persibentia persib		0 000
Bis PERENTATAHAN DESA DAN KEURAHAN APB Osea dan Anggaran Kebarahan APP Osea dan Anggarahan Anggar	Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
III. PEMERINTAMAN DESA DAN KELURAHAN APS-Desa disa Anggaren Keurahan APS-Desa		
APPS Desa din Ariggaran Kelurahan Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit Kelupatan Kelurahan Rip 0.00 Iribit Kelurahan Pereninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan	Dasar rukum pembentukan diganisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan keturahan	
APPS Desa din Ariggaran Kelurahan Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit Kelupatan Kelurahan Rip 0.00 Iribit Kelurahan Pereninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan		<u>'</u>
APPS Desa din Ariggaran Kelurahan Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit engagaran belatis dan pereninsan Desafkiunahan bahun ini Rip 0.00 Iribit Kelupatan Kelurahan Rip 0.00 Iribit Kelurahan Pereninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan Perseninsan perpada di desakahunahan Iribit Kelurahan Perseninsan		
mint an arguman basing darip personnan Deserketurahen lahun in wire Angapana New York (1998) **Part (199	XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
mint an arguman basing darip personnan Deserketurahen lahun in wire Angapana New York (1998) **Part (199	A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Rip 0.00 antian Pemerinta Ratuputen Kata antian Pemerinta Ratuputen Kata antian Pemerinta Ratuputen Kata antian Pemerinta Ratuputen Kata antian Pemerinta Provesti Antian Pemerinta Ratuputen Kata Antian Pemerinta Ratuputen Ratu	Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 0,00
antian Premiertah Kabuseterkota Pip 0.00 Instantan Premiertah Provincial Pip 0.00 Instantan Premiertah Prust Pip 0.00 Instantan Prust Pip 0.00 Instanta		Rn 0 00
antisan Pemerintah Pusat refuspelan Asil Desa dan Kelurahan refuspelan Asil Desa dan Kelurahan Rep. 0.00 refuspelan Asil Desa Kegala Besal Lurah Rep. 0.00 - Pertranggungiawahan Kegala Besal Lurah refuspelan Asil Desa Kegala Besal Kegala Besal Asil Besal Asil Besal Asil Besal Asil Besal Besa	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	
andepation ASS Decas of Michael Services (Assert Services Control Services Control Decas Obera Decas O	Bantuan Pemerintah Provinsi	
wadaya Mayawakar Dasa dan Kolumban Sep 0.00 Solata Dana Desa Unifor Pernapalan dan Perusahana yang ada di desakeluntahan Rep 0.00 Indire Pernapalan dan Perusahana yang ada di desakeluntahan Rep 0.00 Indire Pernapalan dan Perusahana yang ada di desakeluntahan Rep 0.00 Indire Pernapalan yang yan tahun Kidamanghad Rep 0.00 Indire Pernapalan yang yan tahun Kidamanghad Rep 0.00 Indire Pernapalan yang yan tahun Kidamanghad Rep 0.00 Indire Pernapalan yang yang tahun Kidamanghad Rep 0.00 Indire Pernapalan yang yang yang yang yang yang yang ya		
unifor Processors dan Perusahan yang ada di desakhurahan imber pendepatah any yang al-da diseberanjuruan Rp (0.00) unifor bideria p-lakibicherian pembanjuruan Rp (0.00) Pertanggungjanahan Kepata Besaturah Pertanggungjanahan Kepata Besaturah Pertanggungjanahan Kepata Besaturah pertanggungjanahan Kepata Besaturah pertanggungjanahan kepata Besaturah kepata Desak Besata Ber D unifor biderian yang disempakah kepata Besaturah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan walabah kepata Besaturah kepata Besaturah kepatah Besaturah Besatu	Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	
united predipation lain yang sah dan lidakmengkat Rp 0.00 Colora Colo	Alokasi Dana Desa	
immên Beberija Publikobeiraja perbangunara melin Beberija Aparthripagawai Pertanggungjawaban Kepala Desa Lurah veryampaan bedorin hoterangan pertanggungan jawab Kapala Desa kepada BPO weryampaan bedorin hoterangan pertanggungan jawab Kapala Desa kepada BPO weryampaan bedorin hoterangan pertanggungan jawab Kapala Desa kepada BPO weryampaan bedorin hoterangan pertanggungan jawab Kapala Desa kepada BPO weryampaan bedorin hoterangan pertanggungan bangan kewangan jawab Kapala Desa kepada BPO weryampaan bedoringan pertanggungan buda kapada dan banga kapada kap		
Pertanggunglawaban Kopala DesatLurah wyampaina laporan keterangan pertanggungan jawah Kapala Desa kepada BPD minish informasi kepada desampakan kepada desa dan karah tertang laporan persyelenggaraan tugas, wewanang, hak dan lanish informasi kengan garah bugas, wewenang, kewajaban dan hak kepala desa dan karah kepada masyarakat tambah kasus pengadan manyarakat tambah persahan menjada kepada desa dan karah kepada masyarakat manish kasusa pengadan kepada desa dan karah kepada masyarakat manish kasusa pengadan manyarakat tambah masaha kapada desa dan karah kepada masyarakat manish kasusa pengadan masyarakat tambah masaha kepada desa dan kerah kepada masyarakat manish kasusan depada kepada desa daruhan dan kepada masyarakat persahan kepada kepada desa daruhan dan kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakat persahan kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakat persahan kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakatan persahan kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakatan persahan kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakatan persahan kemasyarakatan yang dasa darah darah darah kepada masyarakatan persahan kemasyarakatan yang dalam darah kepada kepada desa daruhan darah kepada masyarakatan persahan kemasyarakatan yang darah kepada darah darah kepada masyarakatan persahan kemasyarakatan yang darah kepada darah darah kepada masyarakatan persahan kemasyarakatan yang darah kepada darah darah kepada masyarakatan persahan kepada kepada darah darah kepada masyarakatan persahan kepada kepada darah kepada masyarakatan persahan kepada kepad	Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	
envyemproleni laporan keterangan pertanggungan jawak Repata Desa kepata BPD mitah hiformasi yang diampalian kepata daesa dan hira hariban yang keta untuk hiformasi yang diampalian kepata daesa dan hira hariban yang keta untuk kepata daesa dan hira hariban kepata keta dan hirah kepata daesa dan hirah kapata masyarakat untuk kepata daena dan hariba kepata daesa dan hirah kapata masyarakat maniha kepata kepata desa dan hariban kepata daena dan hariban kepata Bupat/Walikota untuk kepata daena dan hariban kepata daena dan hariban kepata daena dan kepata kepata daena dan kepata daena dan kepata daena dan kepata daena dan kepata daena daen	Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00
envyemproleni laporan keterangan pertanggungan jawak Repata Desa kepata BPD mitah hiformasi yang diampalian kepata daesa dan hira hariban yang keta untuk hiformasi yang diampalian kepata daesa dan hira hariban yang keta untuk kepata daesa dan hira hariban kepata keta dan hirah kepata daesa dan hirah kapata masyarakat untuk kepata daena dan hariba kepata daesa dan hirah kapata masyarakat maniha kepata kepata desa dan hariban kepata daena dan hariban kepata Bupat/Walikota untuk kepata daena dan hariban kepata daena dan hariban kepata daena dan kepata kepata daena dan kepata daena dan kepata daena dan kepata daena dan kepata daena daen	B. Pertanggungiawahan Kenala Desall urah	
unithi hirofromasi yang disampaian kepala desa dan karia herlang laporan penyelenggaraan lugas, wewenang, hak dan kebula wewenang, hak dan kebulah penda dan hurih hepada ada hurih hepada ada hurih hepada ada hurih kepada dan hurih kepada mengan petrangan petrangang petrangang desa dan hurih kepada dan hurih kepada dan hurih kepada mengan petrangan petrangang dan dan hurih kepada mengan petrangang dan dan hurih kepada mengan petrangang dan hurih kepada mengan petrangang dan hurih kepada dan hurih hepada dan hurih hepada dan hurih hebasa pengadaan masyarakal terbudap mesadah perbanganan, pelayanan dan perbahasan kemasyarakalan yang dasakan kepada dasakurah hurih dan perbangunan, pelayanan dan perbangan dan dan berangangan dan dan berangan dan hurih dan dan berangan	Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	
resignation repose desired and mark separan measyranisms of the control of the co	Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan	jenis
spooran kinerija penyeinenganaran tugas, wewanang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walloda (misha hisasa pengadahan masyarakat terhadap masalah permbangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang abasis anampalaha kepada bejada desahurah masyarakatan pengadahan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang abasis anampalaha kepada bejada desahurah sebada berana dan dan dan dan dan dan dan dan dan	kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	
imith history pergodism masyariast terhadap masalah pembangunan, pelayaran dan pembinaan kemasyarakatan yang kasus ampalakan hagai bepala desahurah sampalakan hagai bepala desahurah sampalakan pengadasan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayaran dan pembinaan kemasyarakatan yang kasus ampalakan yang berakatan y	Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	
sampalkan kepada kepada desahurah melahan kepada kepada mesahurah melah kasas penghadan mesyarakata kerhadan masayarakata kerhadan masayarakata kerhadan masayarakata kerhadan kepada desahurah kepada desahurah kepada desahurah melahan DesaKelurahan PEMERIYAH DESAKELURAHAN **PEMERIYAH DESAKELURAHAN **PEMERIYAH DESAKELURAHAN **PEMERIYAH MESAKELURAHAN **PEMERIYAH MESAKE	Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	Ť
imith hasas pengaduan masyarakat findaga masalah pembangunan, pelayaran dan pembinaan kemasyarakatan yang kasalasakan kepila dasabaruh in PEMERTIKATAN DESAKELURAHAN PEMERTIKATAN PEMERTIK	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	kasus
Presarana Dan Administrasi Pemerintahan DesalKelurahan Presarana Dan Administrasi Pemerintahan DesalKelurahan Petemerintah Desarket. URANAN **CHEMERINTAH DESARKET. URANAN **A Inventaris dan Alast tulis kantor **Invitah menja	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang	kasus
PEMERITAT DESAYKELURAHAN	иізеіезаікан кераіа деза/ійгап	+
PEMERITAT DESAYKELURAHAN	C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	I .
aniah zuang kerja alaa DeaarKourahan/sejenienya serik berarih	1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
alsa Deas/Refurshan/sejenisnya strik r bersih lepton A. Inventaris dan Alat tulis kantor Imfah mesin tk Imfah meja Imfah kusi Imfah tulis Imfah Imfah Imfah kusi Imfah I	Gedung Kantor	-
Strik Ir bresh Jelpon A. Inventar's dan Alat tulls kantor Irriah mesin tik Irriah tursi basah Joah Jo	• •	Ruang
A Inventairs dan Alat tulis kantor Jamiah mesin tik Jamiah dimari araip Jamiah dimari di	Listrik	
A inventaris dan Alat tulis kantor umlah mesin tik umlah dingia umlah kursi umlah dingia umlah kursi umlah aliman aratip oneputer seni fik endaraan Dinas LurahtKepata Desa unit B. Administrasi Penerintahan DesaKulurahan uki Data Paratiman Desa uki Kepatuban Kepata Desa Lurah uki Data Paratiman Desa uki Kepatuban Kepata Desa Lurah uki Data Agministrasi Kepardudukan uki Jaman Beraham Desa Harah uki Data Agministrasi Kepardudukan uki Data Tanah uki Data Tanah uki Data Berahduduk uki Laparan Pengaduan Masyarakat uki Data Berahduduk uki Laparan Pengaduan Masyarakat uki Data Berahduduk uki Data Berahduduk uki Data Berahduduk Sementan uki Data Pendaduk uki Data Berahduduk Sementan uki Data Pendaduki Sementana uki Nagaran Pengaluan Pegawai Pembangunan uki Kas Pembantu Pengeluanan Pengeluanan Pengeluanan Pengeluanan Pengeluan	Air bersih	
umlah meja buah mumlah almati arasip buah mumlah almati arasip buah mumlah almati arasip buah mumlah almati arasip mumlah mesin iki ku Data Inahah almati arasip mumlah almati arasip mumlah meja mumlah almati almati almati almati almati arasip mumlah meja mumlah memiah	Telepon	
umlah meja buah mumlah kursi buah buah mumlah kursi buah buah mumlah meja buah buah mumlah kursi buah buah mumlah meja buah buah mumlah meja buah buah mumlah kursi buah buah mumlah meja buah buah mumlah meja buah buah mumlah kursi buah buah mumlah kursi buah buah mumlah kursi buah buah buah buah buah buah buah buah	1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
imitah kursi imitah alman rasig	Jumlah mesin tik	buah
umlah aimari arsip momputer unit lesin fax unit les	Jumlah meja	
unit endaraan Dinas Lurah/Kepala Desa unit endaraan Dinas Lurah/Kepala Desa unit endaraan Dinas Lurah/Kepala Desa unit unit unit unit endaraan Dinas Lurah/Kepala Desa/Kelurahan Uku Data Peraturan Desa uku Keputusan Kepala Desa/Lurah uku Administrasi Kependudukan uku Administrasi Kependudukan uku Data Tanah Kas Desa uku Data Aparat uku Data Panah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah Has Desa dan Keturahan uku Laporan Pengaduan Masyarakat uku Data Banah Penduduk kutu Peril Desa dan Keturahan uku Data Induk Penduduk uku Data Mutasi Penduduk khiri Bulan uku Data Mutasi Penduduk khiri Bulan uku Data Mutasi Penduduk khiri Bulan uku Aggaran Penduduk khiri Bulan uku Aggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Aggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Aggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Ummu Pendemaan uku Kas Ummu Pendemaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rejawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rejawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rejawai/Pembangunan uku Kas Immin Immin Pengeluaran Rejawai/Pembangunan Uku Kas Immin Pengeluaran Pegawai/Pembangunan Uku Kas Immin Pengeluaran Pegawai/Pembangunan Uku	Jumlah almari arsip	
endaraan Dinas Lurah/Kepala Desa B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan uku Data Peraturan Desa uku Data Peraturan Desa uku Agarah Kepandudukan uku Administrasi Kependudukan uku Administrasi Kependudukan uku Data Inanah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Janah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah uku Data Inanah uku Data Inanah uku Agarah Ekspedisi uku Proffi Desa dan Kelurahan uku Data Induk Penduduk uku Registrasi Penduduk Khiri Bulan uku Registrasi Penduduk Khiri Bulan uku Registrasi Penduduk Khiri Bulan uku Registrasi Penduduk Kementara uku Angaran Pengeluran Pegawai/Pembangunan uku Agaran Pengeluran Rutin/Pembangunan uku Kas Dembantu Penerimaan uku Kas Jemmuh Pengeluraran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluraran Rutin/Pembangunan uku Latan Benga Rutin Pengeluran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluraran Rutin/Pemb	Komputer	+
B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Uku Data Peraturan Desa Uku Keputusan Kepala Desa/Lurah Uku Data Inventaris Uku Data Tanah Kas Desa Uku Labaran Palak Talak Ta	Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kenala Desa	+
uku Data Peraturan Desa uku Kaputusan Repala Desafurah uku Administrasi Kependudukan	Rendalaan Dinas Eurain Repaia Desa	unit
uku Keputusan Kepala Desaflurah uku Administrasi Kepandudukan uku Administrasi Kepandudukan uku Administrasi Kepandudukan uku Data Inanh Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah uku Data Tanah uku Data Tanah uku Data Tanah uku Agenda Ekspedisi uku Agenda Ekspedisi uku Profii Desa dan Kelurahan uku Data Indus Penduduk uku Data Indus Penduduk uku Data Indus Penduduk uku Registrasi Penduduk Akhir Bulan uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Data Musai Penduduk Sementara uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kangaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerima	1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	'
uku Data Inventaris uku Data Inventaris uku Data Aparat uku Data Tanah Kas Desa uku Data Tanah Kas Desa uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah uku Japra Tengaduan Masyarakat uku Japra Pengaduan Masyarakat uku Agenda Ekspedisi uku Proli Desa dan Kelurahan uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Rekapitulasi Penduduk Akhif Bulan uku Rekapitulasi Penduduk Khif Bulan uku Rekapitulasi Penduduk Khif Bulan uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Gumun Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Umun Pengerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rulin/Pembangunan uku Kas Lembaga Kemasyarakatan		
uku Data Inventaris uku Aparat uku Data Tanah Kas Desa	Buku Administrasi Kependudukan	
uku Data Tanah Kas Desa uku Jadministrasi Pajak dan Retribusi uku Jadministrasi Pajak dan Retribusi uku Data Tanah uku Laparan Pengaduan Masyarakat uku Porfil Desa dan Kelurahan uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk Akhir Bulan uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor umlah ruang kerja Ruang alai BPD - strik ir ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor umlah menja buah umlah dimari araip buah <td>Buku Data Inventaris</td> <td></td>	Buku Data Inventaris	
uku Administrasi Pajak dan Retribusi uku Laporan Pengaduan Masyarakat uku Laporan Pengaduan Masyarakat uku Denda Ekspedisi uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Rekapituasi Penduduk Akhir Bulan uku Rekapituasi Penduduk Akhir Bulan uku Respistrasi Pelayanan Penduduk uku Anggaran Pengeluaran Pengawai/Pembangunan uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Penduduk uku Data Penduduk Sementara uku Data Penduduk Sementara uku Data Penduduk Sementara uku Kas Umm uku Data Penduduk	Buku Data Aparat	
uku Data Tanah uku Agenda Ekspedisi uku Agenda Ekspedisi - uku Data Muku Penduduk - uku Data Muku Penduduk - uku Registrasi Penduduk Akhir Bulan - uku Registrasi Pelayanan Penduduk - uku Data Bududuk Sementara - uku Anggaran Pengefunara - uku Kangaran Pengeluaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan - uku Kas Pembantu Penerimaan - uku Kas Sembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan - uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan - uku Data Lembaga Kemasyarakatan - PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD - edung Kantor - umlah ruang kerja Ruang alai BPD - sirik - ir bersih - elepon - A. Inventaris dan Alat tulis kantor - malah almari arsip buah umlah almari arsip buah umlah almari arsip buah bush bush-umlah dami arsi sepilaruan arsi ku-buku administrasi kegiatan BPD - uku b	Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
uku Agenda Ekspedisi uku Datai Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan uku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan uku Rejsitrasi Pelayanan Penduduk uku Buta Penduduk Sementara uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan Ruang -PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD Pedung Kantor umlah ruang kerja Ruang alai BPD - strik Iri bersih elepon - A. Inventaris dan Alat tulis kantor - umlah meja buah umlah meja buah umlah meja buah umlah kursi buah umlah meja buah umlah meja buah umlah weja buah umlah weja buah uku buku daministrasi kegiatan BPD uku buku Administrasi kegiatan BPD uku buku kegiatan BPD <	Buku Data Tanah	
uku Potii Desa dan Kelurahan uku Data Induk Penduduk uku Data Mutasi Penduduk Akhir Bulan uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Angaran Penerimaan uku Angaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Limun penerimaan penerimaan	Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
uku Data Induk Penduduk uku Data Induk Penduduk uku Rekapituasi Penduduk Akhir Bulan uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan	Buku Agenda Ekspedisi Buku Profil Desa dan Kelurahan	
uku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan uku Rekapitulasi Pelayanan Penduduk uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Penerimaan uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor unlah ruang kerja alai BPD sitrik ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor unlah menja buah unlah kursi buah unlah kursi buah omputer buah omputer unit lesin fax unit B. Administrasi BPD uku buku administrasi kegiatan BPD uku buku kagiatan BPD uku bimpunan peraturan desa	Buku Data Induk Penduduk	
uku Registrasi Pelayanan Penduduk uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor Imlah ruang kerja alai BPD istrik ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor Imlah mesin tik	Buku Data Mutasi Penduduk Buku Rekanitulasi Penduduk Akhir Bulan	
uku Data Penduduk Sementara uku Anggaran Penerimaan uku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Bata Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor Imlah ruang kerja alai BPD	Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Bata Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor umlah ruang kerja alai BPD strik ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor umlah mesin tik buah umlah meja umlah meja umlah almari arsip buah omputer lesin fax B. Administrasi BPD uku buku administrasi kegiatan BPD uku buku kadministrasi kegnagotaan uku Kas Sembantu Penerimaan uku Kas Dembantu Penerimaan Ruang Ruang Ruang Ruang - strik	Buku Data Penduduk Sementara	
uku Kas Umum uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor umlah ruang kerja alai BPD strik ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor umlah mesin tik umlah meja buah umlah meja buah umlah meja buah omputer lesin fax unit B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Kadministrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD lesin fax lesin	Buku Anggaran Penerimaan Buku Anggaran Pengeluaran Pengawai/Pembangunan	
uku Kas Pembantu Penerimaan uku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor Imlah ruang kerja alai BPD - strik ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor Imlah mesin tik Imlah meja Imlah meja Imlah meja Imlah kursi Imlah meja Imlah lamari arsip Imlah almari arsip Imlah dalmari arsip	Buku Anggaran Pengeluaran Pegawali Pembangunan Buku Kas Umum	
uku Data Lembaga Kemasyarakatan PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor unlah ruang kerja Ruang alai BPD sistrik ir bersih elepon	Buku Kas Pembantu Penerimaan	
PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD edung Kantor Ruang kerja Ruang alai BPD		
Ruang Ruan	Duna Data LettiDaya Nettidayalanatdii	
umlah ruang kerja alai BPD - sistrik ir bersih elepon - A. Inventaris dan Alat tulis kantor mlah mesin tik buah umlah meja buah umlah meja buah omputer lesin fax unit lesin fax unit B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kimpunan peraturan desa Ruang - sistric buah buah unit lesin fax unit B. Administrasi kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD	2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
A linventaris dan Alat tulis kantor	Gedung Kantor	
Istrik Ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor Imlah mesin tik Imlah meja Imlah Musi Imlah Musi Imlah dimari arsip Imlah dimari ars	Jumian ruang kerja	Kuang
ir bersih elepon A. Inventaris dan Alat tulis kantor umlah mesin tik buah umlah meja buah umlah kursi buah umlah almari arsip buah omputer unit tesin fax unit B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD uku ku kegiatan BPD	Ralai RPD	IT.
A. Inventaris dan Alat tulis kantor Imlah mesin tik buah Imlah meja buah Imlah kursi buah Imlah almari arsip buah Imlah almar	Balai BPD Listrik	
Junlah mesin tik buah Junlah meja buah Junlah kursi buah Junlah almari arsip buah Junlah almari arsip buah Junlah almari arsip unit Junlah almari	Listrik Air bersih	
Junlah mesin tik buah Junlah meja buah Junlah kursi buah Junlah almari arsip buah Junlah almari arsip buah Junlah almari arsip unit Junlah almari	Listrik	
umlah kursi buah umlah almari arsip buah omputer unit lesin fax unit B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Buku Administrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon	
umlah almari arsip buah omputer unit lelsin fax unit B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Buku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	buah
omputer unit lesin fax unit IB. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Buku kadministrasi Keanggotaan uku ku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja	buah
B. Administrasi BPD uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku Beyiatan BPD uku hegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi	buah buah
uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja	buah buah buah
uku-buku administrasi kegiatan BPD uku Buku Administrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip	buah buah buah unit
uku Buku Administrasi Keanggotaan uku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax	buah buah buah unit
uku kegiatan BPD uku himpunan peraturan desa	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD	buah buah buah unit
	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah lamari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegjatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan	buah buah buah unit
,	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku-buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD	buah buah buah unit
	Listrik Air bersih Telepon 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku Kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa	buah buah buah unit

Untitled Document	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	I
Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan Jumlah pengurus	Jenis Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan	
kelurahan	
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan	
serta BPD	
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing- masing	
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan	kegiatan
lembaga kemasyarakatan	kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang	
ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,	jenis
pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis I
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa	jenis
dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan	
kelurahan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	jenis
,	
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	jenis jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada	jenis
kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan	ř
desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat	jenis I
Desa/Kelurahan dan BPD	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	
	jenis
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	jenis
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	[
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	jenis
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	jenis jenis
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendatah dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	jenis jenis jenis
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintaĥan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	jenis jenis jenis jenis kasus
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendatah dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	jenis jenis jenis jenis kasus
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	jenis jenis jenis jenis kasus kasus
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasii kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendatahan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasus kasus
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Tasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan data dan pendayagunaan aata dasa kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasii kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Tasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tigas, mewenang, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Jamlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi pengelan data dan pendayagunaan atet desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi pengelaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, belaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pengaran kelurahan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Tasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan pengakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan pendayagunaan atat profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan trugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Fasilitasi penpataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan dan perlombaan dan pasca perlombaan Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendatam dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi pengelolaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan kelenteraman dan ketertiban umum Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi patisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dan pesa perlombaan Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah ke	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasis kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Jumlah kegiatan f	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penretapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan fasili	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kasis kali kali kali kali kali kali kali kali
kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi penguatan dan pengagaraan ketenteraman dan ketertiban umum Fasilitasi penpentaan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kema	jenis jenis jenis jenis kasus kasus kasus kali kali kali kali kali kali kali kali

Kecamatan Cempaka Kota KOTA BANJARBARU	
<u>Suprianto, S.Pt., MM</u> Lurah	
Tembusan : 1. Camat Cempaka 2. Walikota KOTA BANJARBARU 3. Arsip	